

Koran DIGITAL

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



**PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033**

Lebih Dekat dengan Satu Klik



**SUDAH 10 HARI, LAHAN GAMBUT
DESA SABINTULUNG MASIH TERBAKAR**

BACA HALAMAN 2-3



**PERMENDAGRI
PENETAPAN PJ
GUBERNUR DISEBUT
ATURAN "BANCI"
BACA HALAMAN 34**

Sudah 10 Hari, Lahan Gambut Desa Sabintulung Masih Terbakar

TENGGARONG - Memasuki hari ke-10, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, belum juga padam. Titik-titiknya pun tersebar, dengan beragam luasan. Namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Kartanegara (BPBD Kukar).

Dijelaskan Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kukar, Abdal, belum merinci secara jelas jumlah luasan lahan yang terbakar. Lantaran kondisi lahan gambut yang terbakar masih menyala. Tetapi diperkirakan sudah puluhan hektare yang terdampak. Jumlah ini akan terus bertambah, selama api belum bisa "dijinakkan".

"Ada beberapa titik api, ada yang masih kecil, (kini) yang ditangani yang sudah besar. Luasan masih dihitung, potensi tiap hari bertambah," ungkap Abdal pada mediakaltim.com, Selasa (12/9/2023).

Terkait kendala penanganan, Abdal menyebut bukan kepada ketersediaan air. Tapi lebih kepada kondisi lahan yang terbakar. Yakni memang kelihatannya permukaan lahan berhasil dipadamkan, namun tidak pada bagian bawahnya. Ketika kering, maka akan menyala lagi, karena memang kondisi bagian bawah lahan yang kering.

Dalam upaya pemadaman yang sudah berjalan lebih dari sepekan ini, BPBD Kukar dibantu oleh Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan perusahaan yang beroperasi di Desa Sabintulung. Di mana per-



BPBD KUKAR

Lahan di Desa Sabintulung yang masih terbakar, terus dilakukan pemadaman oleh BPBD Kukar, Manggala Agni, MPA dan perusahaan.

sahaan dengan menggunakan alat berat, untuk melakukan penyekatan agar api tidak terus meluas. Juga mengerahkan kendaraan slip on BPBD Kukar, agar lebih memudahkan mobilitas dalam melakukan pemadaman.

"Intinya BPBD dan lainnya akan fokus menangani ini, bersama MPA, termasuk perusahaan membantu," lanjutnya.

Terkait personel yang diturunkan, Abdal menjelaskan membagi dalam tiap pekan. Tiap pekannya sebanyak 10 personel dari BPBD Kukar yang di-

turunkan bersama 7 anggota Manggala Agni. Dan beberapa anggota yang tergabung dalam MPA. Sempat melakukan pergantian personel pada Sabtu (9/9/2023) lalu. Dilanjutkan tim regu 2 BPBD Kukar yang berjumlah 10 orang. Dan bantuan dari perusahaan setempat.

"Selain siapkan alat berat, perusahaan juga siapkan konsumsi dan tempat istirahat bagi para petugas," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Proses penanggulangan karhutla oleh petugas.

Siaga Darurat Karhutla di Paser, Akibat Buka Lahan dengan Dibakar

PASER – Musim kemarau yang diperparah kekeringan di sejumlah wilayah jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Sejauh ini, Pemkab Paser sudah menetapkan siaga darurat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Paser.

Hal itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI nomor 11 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla, yang diterbitkan sejak Senin 24 Juli 2023 lalu.

Dari penetapan siaga darurat itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser mencatat, sebanyak 91 kasus karhutla sudah terjadi hingga pertengahan September 2023 ini. Dari total kasus tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 300,85 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan.

Menanggapi sederet persoalan karhutla tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Paser, Ruslan menyebut, kasus kebakaran yang marak terjadi diduga disebabkan adanya unsur kesengajaan oleh

oknum masyarakat.

“Memang ada unsur sengaja oleh masyarakat, melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar,” kata Ruslan, saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023).

Sementara, meluasnya kebakaran yang kerap terjadi, ditambahkan Ruslan, karena pada proses pemadaman juga dihadapkan dengan kendala. Kendala itu di antaranya peralatan yang terbatas dan ketersediaan air yang sulit didapatkan khususnya di lokasi pemadaman terdekat.

“Kendalanya itu berupa embung yang jauh dari titik kebakaran. Termasuk debit air sungai mulai mengering,” tambahnya.

Selain kendala kendala itu, beberapa lokasi kebakaran tidak mampu dilalui oleh armada yang tersedia. Sehingga petugas lapangan berupaya melakukan pemadaman secara manual menggunakan dedaunan.

“Karena petugas juga kesulitan, saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tegasnya.

Dari 91 kasus tersebut, Kecamatan Tanah Grogot tercatat sebagai wilayah

dengan kejadian terluas mencapai 169 hektare dengan 44 kejadian. Sementara wilayah terluas kedua yaitu Kecamatan Long Kali mencapai 57,65 hektare dengan 7 kejadian.

Berbeda dengan Kecamatan Paser Belengkong dengan luasan yang terbakar mencapai 41,6 hektare namun dengan 8 kejadian. Di Kecamatan Muara Samu, luasan wilayah yang terbakar mencapai 10,92 hektare dengan 6 kejadian.

Di Kecamatan Long Ikis luasan wilayah yang terbakar mencapai 5,7 hektare dengan kejadian. Uniknya, di Kecamatan Batu Engau luasan wilayah yang terdampak hanya 5,48 hektare namun peristiwa kebakarannya mencapai 13 kejadian.

Sementara Kecamatan Tanjung Harapan luasan wilayah yang terbakar mencapai 5 hektare dengan jumlah 3 kejadian. Di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Kuaro kasus kebakaran mencapai 1 hektare dan 0,5 hektare yang masing-masing 1 kejadian.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Pemprov Kaltara Raih Penghargaan 'Indonesia 12aya' Kompas TV

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan dalam acara malam puncak "Indonesia 12aya" yang merupakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kompas TV. Penghargaan ini diterima di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, pada, Senin (11/9/2023) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., yang mewakili Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menerima penghargaan kategori "Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal" secara langsung dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Sekprov Suriansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerjasama dalam pengembangan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia di Kaltara.

"Terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam mengembangkan program kegiatan untuk memberdayakan UMKM dan memperjuangkan kemajuan daerah kita," ujar Sekprov Kaltara, Suriansyah.

Pemprov Kaltara, lanjut Sekprov, memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan UMKM dan memanfaatkan sumber daya lokal. Hal ini terbukti saat pandemi Covid-19, di mana Pemerintah Provinsi Kaltara terus mendorong penggunaan dan konsumsi hasil bumi Benuanta dengan bangga.

"Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal, terutama UMKM, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Per-gub) tentang Penggunaan Pangan Lokal, Batik Khas daerah Kaltara,"

jelasnya.

Namun, dalam setiap penyelenggaraan event-event, Pemerintah Provinsi Kaltara selalu aktif melibatkan UMKM dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Sekprov Suriansyah berharap UMKM dan sumber daya lokal di Kaltara dapat terus tumbuh dengan kualitas tinggi dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

"Harapan kami adalah agar UMKM kita dapat menjadi lebih mandiri, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kaltara, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bersaing di tingkat internasional," pungkasnya. (dkisp)



MONITORING: Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si meninjau kegiatan normalisasi Sungai Buaya, Tanjung Selor, Selasa (12/9).

Wagub Yansen TP : Normalisasi Sungai Buaya jadi Kebutuhan Mendesak

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si, melakukan peninjauan kegiatan normalisasi Sungai Buaya Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada Selasa (12/9). Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan normalisasi sungai berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam peninjauannya, Wagub didampingi oleh beberapa pejabat, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Bulungan, Errin Wiranda, SE, Kepala Biro Pembangunan Kaltara, Sapi'i, Kepala Satpol PP Kaltara, Selamat R, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Wagub Kaltara mengatakan bah-

wa normalisasi Sungai Buaya adalah langkah penting dalam upaya mengatasi banjir di wilayah Kaltara. Sungai Buaya, sebagai salah satu sungai di Kaltara, memiliki potensi banjir yang signifikan.

"Normalisasi sungai ini sangat penting dan merupakan kebutuhan mendesak," ujar Wagub Kaltara, Yansen TP.

Sesuai kondisi di lapangan, progress normalisasi Sungai Buaya pada segmen I, hasil kerjasama antara Pemprov Kaltara dengan Komando Resort (Korem) 092/Maharajalila, telah mencapai 59,94 persen. Sementara pada pengerjaan segmen II, yang menjadi tanggung jawab Pem-

prov Kaltara melalui DPUPR-Perkim, progresnya telah mencapai 30,27 persen.

Kegiatan normalisasi ini mencakup pengerukan endapan lumpur hingga kedalaman 2 meter, pembersihan sampah dan eceng gondok di sungai. Selain itu, juga ada pengerukan sedimen di sekitar sungai untuk memperlebarnya hingga lebar mencapai 30 meter.

Wagub Yansen TP berharap agar kegiatan normalisasi Sungai Buaya dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, diharapkan risiko banjir di wilayah Kaltara dapat diminimalkan. **(dkisp)**



SP4N-LAPOR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang SP4N-LAPOR, Selasa (12/9/2023).

Gandeng Mahasiswa, Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Kaltara Sosialisasi SP4N-LAPOR!

TARAKAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), Selasa (12/9/2023).

Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara berkolaborasi dalam inisiasi sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) juga turut hadir sebagai salah satu leading sector dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kaltara.

Sosialisasi yang bertajuk "SP4N-LAPOR! Goes to Campus" dibuka oleh Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P.,

dengan kehadiran Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.

Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, menyambut baik kegiatan ini karena diyakini bahwa mahasiswa pasti memiliki keluhan terhadap pelayanan yang ada di kampus.

"Rekan-rekan mahasiswa yang malu atau takut mengadukan pelayanan kampus, bisa melaporkan melalui aplikasi LAPOR! ini," kata Adri Patton kepada mahasiswa.

Syahrullah Mursalin mengapresiasi terobosan kegiatan yang menyasar kaum intelektual sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, diungkapkan bahwa hingga September 2023, telah tercatat 14 aduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!.

"Hanya ada 14 aduan yang masuk

ke Kaltara melalui aplikasi ini. Jumlah ini kurang bisa menggambarkan kondisi pelayanan publik di Kaltara," ucap Syahrullah Mursalin.

Lanjutnya, Syahrullah berharap agar mahasiswa dapat aktif mengawasi proses pelayanan publik di Kaltara, dengan harapan bahwa partisipasi mereka akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan menuju arah yang lebih baik.

"Kita berharap kawan-kawan mahasiswa tetap mengawasi pelayanan publik yang ada, kalau ada pelayanan yang kurang bagus bisa diadukan melalui aplikasi LAPOR!," tutup Syahrullah sebelum membuka kegiatan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini Ombudsman RI Kaltara juga membuka gerai pelaporan dan konsultasi untuk mahasiswa UBT sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mengawasi pelayanan publik di Kaltara. (dkisp)



YAHYA/MEDIA KALTIM

Sekda Bontang, Aji Erlynawati saat pelaksanaan Bimtek implementasi SKA.

Bimtek SKA, Upaya Peningkatan Perdagangan Ekspor

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Bontang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait implementasi penertiban dan pemanfaatan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) bagi barang-barang ekspor pada Selasa (12/9/2023) di hotel Bintang Sintuk.

Sekretaris Diskopukmp, Alfrita Junain Sande mengatakan untuk meningkatkan perdagangan perlu adanya kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk memberikan pengetahuan kepada beberapa perusahaan sebagai pelaku ekspor asal barang-barang.

“Suatu ketentuan administrasi yang diatur oleh kelompok negara mengenai asal barang yang ditentukan dengan surat keterangan asal

(SKA),” kata Alfrita.

Ia menambahkan SKA merupakan dokumen yang disertakan untuk barang dari Indonesia yang ditujukan pada negara-negara tujuan ekspor. “SKA merupakan surat yang membuktikan bahwa barang-barang atau hasil barang berasal dari Indonesia atau diolah di Indonesia,” katanya.

Sementara itu Sekda Bontang, Aji Erlynawati mengatakan sebagai instansi yang mengeluarkan SKA di wilayah Kalimantan Timur, DiskopUKMP juga mengeluarkan SKA bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah sekitar Kota Bontang seperti wilayah Kutim.

“Ketika berbicara mengenai barang ekspor bukan hanya berbicara mengenai nama perusahaan eksportir atau kota tempat asal barang diproduksi, tetapi menyangkut hubungan dagang antar negara,” kata Aji

Erlynawati saat membuka kegiatan, Selasa (12/9/2023).

Aji mengharapkan agar perusahaan-perusahaan yang menggunakan formulir SKA di Disko UKMP agar menjaga prosedur penertiban SKA sesuai dengan regulasi yang ditentukan.

“Saya yakin perusahaan-perusahaan besar di Bontang akan tertib dan taat dalam melaksanakan aturan yang ada,” jelasnya.

“Saya yakin optimis dalam pelaksanaan Bimtek yang berhubungan dengan implementasi penerbitan SKA ekspor agar berjalan dengan peningkatan arah kebijakan pemerintah dalam ekspor,” pungkasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YUSVA ALAM

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina saat diwawancara awak media usai pimpin RDP.

Amir Tosina Geram! Pemkot Pakai Lahan di BSD untuk Buang Limbah Tapi Belum Dibebaskan

BONTANG - Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina terlihat geram dan dengan tegas meminta lahan yang dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah di Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai agar ditutup.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bontang bersama para pemilik lahan dan OPD terkait. RDP terkait Lahan Pemakaman Bontang Barat, Lahan RTH BSD dan Lahan RTH di Jalan Brokoli Kelurahan Gunung Elai, di Ruang Rapat Lantai II, Sekretariat DPRD, Senin (11/9/2023)

Menurut Atos sapaannya, lahan milik warga bernama Hariadi tersebut sudah sejak lama digunakan untuk pembuangan limbah saluran rumah tangga oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Namun, hingga saat ini urung membebaskan lahan tersebut.

Kondisi ini membuatnya geram.

Menurutnya, pemerintah hanya berjanji-janji saja dan tidak segera menindaklanjuti penyelesaian lahan tersebut.

"Tutup saja lahan itu. Malu kita ini, bisa-bisanya pemerintah pakai lahan warga sudah sekian tahun lamanya, tapi sampai sekarang belum juga dibebaskan. Harusnya kalau sudah pakai itu lahan, ya diselesaikan," serunya dengan nada kesal.

Luas lahan itu diungkapkannya, seluas 4.300 meter persegi. Ia pun mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan soal lahan tersebut. Pun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengaku belum ada instruksi dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti lahan tersebut.

"Tadi saat DLH ditanya ternyata gak nyambung, perwakilan DLH tidak tahu soal lahan itu. Berarti ini pemerintah cuman janji-janji saja. Padahal warga mengadukan, sudah datang wali kota juga. Jawabannya sudah di-

anggarkan, padahal belum ada sama sekali tindak lanjutnya," bebarnya.

Pihaknya pun sudah sidak di lahan tersebut. Terlihat lahan itu sudah dimanfaatkan atas permintaan pemerintah. "Saya pikir sudah selesai masalah lahan ini, karena sudah cukup lama. Ternyata pemerintah belum juga menyelesaikan. Makanya saya minta tutup saja itu biar pemerintah tahu bahwa ada hak orang lain. Enggak boleh menguasai itu," tandasnya.

Hariadi, pemilik lahan mengungkapkan, lahan miliknya itu sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah sejak lama. Ia pun sudah beberapa kali mengikuti RDP untuk penyelesaian masalah lahan yang digunakan pemerintah tersebut. Namun sampai sekarang belum ada kabar dan kejelasan soal pembebasan lahan itu.

"Saya sudah ikut RDP tiga kali. Menghadap wali kota secara resmi sekali. Tapi belum ada respon dari pemerintah," bebarnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Rapat Pembahasan Raperda Retribusi dan Pajak Daerah di Gedung DPRD, Senin (11/9/2023).

Komisi II Lanjutkan Pembahasan Raperda Retribusi dan Pajak Daerah

BONTANG - Komisi II DPRD Bontang kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (11/9/2023).

Rapat pembahasan digelar di Gedung DPRD Bontang, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam.

Dikatakan Rustam, Raperda ini merupakan aturan yang disatukan menyesuaikan dengan regulasi atau Undang-Undang (UU) Omnibus Law. Mencakup berbagai isu, topik, atau hukum untuk semua.

"Raperda pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instruksi dari pusat," ujarnya.

Rustam mengharapkan pembahasan ini segera selesai, agar dapat

disahkan dan diberlakukan. Sebab akan berdampak ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Harus cepat selesai. Kalau tidak cepat selesai akan berdampak ke PAD. Karena pemerintah tidak bisa menarik pajak dan retribusi," timpalnya.

Saat ini telah masuk tahapan membahas besaran tarif atau nilai retribusi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang harus segera ditetapkan atau diselaraskan. Jika ada kenaikan satu rupiah akan dibahas dan disepakati bersama.

"Rupanya instruksi dari pemerintah pusat ini sudah lama. Di Sleman Jogjakarta saja sudah disahkan. Gak tahu kenapa di Bontang ini lambat instruksinya. Makanya kami panggil

semua OPD untuk tanyakan apa saja yang ada kenaikan," bebernya.

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati berharap Raperda ini bisa segera terealisasi. Terutama ketika ada kenaikan nilai soal retribusi tersebut bisa memberi alasan atau penjelasan.

"Semoga semua berjalan lancar sesuai yang kita harapkan untuk menambah PAD. Seperti kita tahu PAD kita sangat kecil dan bisa dikatakan belum mandiri secara fiskal. Kalau pun ada naik dan penurunan nilai yang akan diberlakukan, bisa diberikan alasan-alasannya, sehingga bisa diterima semua pihak," imbuhnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Kunjungan DPRD bersama OPD terkait ke lokasi serangan buaya di Kelurahan Guntung.

Cegah Serangan ke Warga Terulang, Legislatif Setuju Buaya Masuk Pemukiman Direlokasi

BONTANG - Unsur pimpinan bersama Komisi I dan III DPRD Bontang dan OPD terkait mengunjungi lokasi kasus warga digigit buaya, serta rumah korban di Kelurahan Guntung, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, pihaknya sepakat apabila buaya yang masuk di pemukiman warga harus direlokasi.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, sering masuknya buaya ke pemukiman warga cukup berbahaya, lantaran banyak warga yang harus

melaut untuk mencari nafkah.

"Ini demi keselamatan warga juga. Buaya-buaya yang masuk di pemukiman itu harus direlokasi," tegasnya.

Pasca menengok ke lokasi kejadian, rombongan DPRD bersama OPD beralih ke rumah korban bernama Fitri.

"Alhamdulillah, korban sudah melewati masa kritisnya. Semoga bisa segera kembali pulih. Kami juga miris dan prihatin melihat kondisinya," ucapnya

Sementara itu, suami korban Zulkifli mengatakan, bahwa yang menerkam sang istri beberapa waktu lalu ialah Buaya Riska.

"Saya yakin dan ingat betul kalau itu Buaya Riska yang sering datang ke pemukiman," sebutnya.

Diketahui, pada akhir Agustus lalu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sudah merelokasi buaya ukuran 3 meter yang masuk ke pemukiman warga. (al/adv)



ADV DPRD BPP

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Ryan Desyanto

Gandeng UGM, Dewan Bahas Kajian Museum Sejarah Balikpapan

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi IV beberapa waktu lalu telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) membahas kajian bersama Universitas Gajah Mada (UGM) terkait Museum Sejarah Kota Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Ryan Desyanto mengatakan, usai dilakukannya FGD tersebut diharapkan Kota Balikpapan segera dapat dibangun museum sejarah setelah kemerdekaan, di mana terdapat sejarah terbentuknya Kota Balikpapan dan terbentuknya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Mudah-mudahan di tiga generasi ini bisa dirumuskan oleh teman-

teman dari kajian bersama UGM. Ini juga merupakan usulan dari Komisi IV. Semoga bisa dilaksanakan dan menjadi Perda," ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Doris menyampaikan, rencana pembangunan museum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda di Kota Balikpapan. Karena banyak sekali situs-situs sejarah yang hilang, seperti di kawasan Dahor, Balikpapan Barat yang saat ini sudah diubah bangunannya menjadi apartemen. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari sejarah Kota Balikpapan.

"Karena memang kita kurang konsen terkait pelestarian cagar budaya.

Nanti nama Perdanya itu kemungkinan Perda Museum atau Pelestarian Cagar Budaya. Nanti teman-teman dari Bapemperda yang merumuskan," jelasnya.

Doris berharap, semoga museum ini dapat segera ditentukan lokasinya dan dibangun. Tentunya ini juga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Balikpapan.

"Kan kalau menarik, pasti dikunjungi. Kalau sudah begitu bisa menumbuhkan ekonomi Balikpapan juga," tutupnya. (adv)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



ADY/RADAR KUKAR

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Anggaran Fantastis, Ketua DPRD Kukar Minta Disdikbud Maksimalkan Dana Pendidikan

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu meringankan beban orang tua murid pada APBD-P 2023.

Bukan tanpa alasan, harapan ini lahir setelah pada bulan Agustus lalu, DPRD Kukar bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menetapkan APBD-P Kukar menjadi Rp 11,8 triliun.

Angka ini terbilang sangat fantastis, bahkan meningkat hingga Rp 4 triliun. Bila dibandingkan dengan

APBD murni yang berada diangka Rp 7,8 triliun. "Ini kan anggaran kita terbilang sangat besar dan alokasi untuk pendidikan itu diatur dalam mandatory spending 20 persen dari APBD. Jadi sedikit banyaknya ini harus bisa dimanfaatkan juga untuk meringankan beban orang tua murid," tutur Rasid, Selasa (11/9/2023).

Apalagi, beberapa waktu lalu sempat ada beberapa kelompok masyarakat yang menyuarakan agar pemerintah mengadakan seragam sekolah gratis. Rasid menilai hal ini sangat mungkin untuk direalisasikan oleh Disdikbud Kukar.

"Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi saya kira ini masih sangat memungkinkan untuk direalisasikan," tambahnya.

Oleh karena itu, Rasid berharap Disdikbud Kukar bisa merencanakan kegiatan dengan tepat sasaran. Khususnya yang berkaitan dengan membantu meringankan beban para orang tua murid. "Salah satunya seperti seragam gratis, atau mungkin yang lain," pungkasnya. (adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



RAFI'/MEDIA KALTIM

Suasana Sidang Paripurna DPRD Kukar, membahas 2 usulan Raperda diluar Propemperda.

DPRD-Pemkab Kukar Bahas 2 Raperda Usulan di Luar Propemperda

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara menggelar Rapat Paripurna, terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Rapat yang digelar pada Selasa (12/9/2023), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono. Sementara dari Pemkab Kukar, dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Ahmad Taufik Hidayat.

Sebanyak dua usulan Raperda yang

diusulkan. Yakni masing-masing Raperda berkaitan tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Sarang Burung Walet, serta Raperda tentang Ketertiban Umum yang menjadi usulan resmi yang dilonarkan oleh Pemkab Kukar.

"Kenapa Raperda walet ini menjadi pembahasan yang sangat intens di DPRD Kukar maupun dinasterkait, karena walet merupakan salah satu PAD kita yang harus dikelola dengan baik," ujar Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Selain menjadi PAD yang cukup menjanjikan bagi Kukar, namun kenyataan di lapangan harga di tingkat

petani yang sangat jomplang. Ini menjadi upaya DPRD Kukar dan Pemkab Kukar, memastikan para petani mendapatkan untung yang sesuai. Maka dari itu, Pemkab Kukar dan DPRD Kukar sepakat untuk segera membahas dan mengesahkannya menjadi peraturan daerah (perda).

"Perda ini bisa memberikan efek yang positif bagi masyarakat kita, terutama para petaninya," tutup Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Koran DIGITAL
MEDIA
KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim
 mediakaltimdotcom
 mediakaltim.com
 media kaltim



Disperkim Kukar Siapkan Rp 68,5 Miliar untuk Infrastruktur SPAM di Desa-desa

TENGGARONG - Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang terus dikebut oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin seperti yang tercantum dalam program dedikasi Kukar Idaman.

Melalui Kabid Kesehatan Lingkungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, Supriyadi Agus, sepanjang 2023 akan mengerjakan 60 kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan nominal pengerjaan sebesar Rp 68,5 miliar.

Dari anggaran tersebut, Supriyadi menyebut kisaran Rp 19 miliar dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur SPAM. Sedangkan Rp 49,5 miliar sisanya untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM yang sudah terbangun.

Supriyadi merincikan, ada 17 unit infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun di 8 Kecamatan di Kukar. Sementara 24 kegiatan peningkatan SPAM yang sudah terbangun dan 19 kegiatan perluasan infrastruktur SPAM.

"Program pembangunan SPAM bapak bupati (Edi Damansyah) di desa-desa ini akan habis di 2024, tinggal dusun-dusun saja lagi," ujar Supriyadi pada mediakaltim.com, Selasa (12/9/2023).

Peningkatan SPAM yang dimaksud oleh Supriyadi, berupa penambahan kapasitas infrastruktur SPAM yang terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Seperti penambahan kapasitas bak penampungan airnya. Mengubah penampungan air yang semula berupa tandon-tandon, menjadi Water Treatment Plant (WTP).

Sementara untuk kegiatan perluasan infrastruktur SPAM, lebih kepada penambahan jumlah sambungan rumah penerima manfaat. Disesuaikan dengan jumlah sambungan yang terus bertambah di lokasi tersebut.



Peningkatan Akses Air Bersih di Kukar

- Anggaran SPAM**

 - Anggaran total untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Rp 68,5 miliar.
 - Rp 19 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPAM.
 - Rp 49,5 miliar digunakan untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM yang sudah ada.
- Lokasi Proyek**

 - Terdapat 17 unit infrastruktur SPAM yang akan dibangun di 8 Kecamatan di Kukar.
 - 24 kegiatan peningkatan SPAM yang sudah ada.
 - 19 kegiatan perluasan infrastruktur SPAM.
- Penyelesaian Proyek**

 - Program pembangunan SPAM di desa-desa diharapkan selesai pada tahun 2024.

- Peningkatan Kapasitas SPAM**

 - Peningkatan SPAM mencakup penambahan kapasitas bak penampungan air.
 - Mengubah penampungan air yang semula berupa tandon-tandon menjadi Water Treatment Plant (WTP).
- Perluasan Jaringan**

 - Perluasan infrastruktur SPAM melibatkan penambahan jumlah sambungan rumah penerima manfaat sesuai dengan pertumbuhan di lokasi tersebut.
- Manajemen SPAM**

 - SPAM yang dibangun akan dikelola secara mandiri oleh desa penerima manfaat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - Masyarakat akan membayar iuran bulanan untuk pemeliharaan.
- Target RPJMD**

 - Target RPJMD Kukar adalah menyelesaikan pembangunan SPAM di 56 desa pada akhir 2023.



Kebutuhan dasar air bersih menjadi prioritas oleh Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam Program **Dedikasi Kukar Idaman**.

SUMBER: Bidang Kesehatan Lingkungan Disperkim Kukar | FOTO: RETNAWA | GRAFIS: AKTO | EDITOR: AGUS SRIANTO

Ke depannya, SPAM yang dibangun akan dikelola secara mandiri oleh desa penerima manfaat. Yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mulai dari perawatan hingga iuran perbulannya. Namun sebelumnya akan dilatih dalam proses pengelolaannya.

“Sangat maksimal dirasakan masyarakat, nanti akan dikelola oleh BUMDes dan pembiayaan akan dibahas mereka, dengan sistem pembayaran (pemakaian) tiap bulan,” lanjutnya.

Terkait target Disperkim Kukar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026, diklaim tuntas pada akhir 2023 ini. Yakni menyelesaikan pembangunan SPAM di 56 desa dalam waktu 2 tahun. Nantinya pada tahun 2024 mendatang lebih kepada fokus pembenahan SPAM yang sudah dibangun.

“Pembangunan tidak ada kendala, karena sifatnya teknis, yang terkendala ini SDM yang mengelola saja lagi, butuh pelatihan,” tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kabid Penyehatan Lingkungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, Supriyadi Agus.



LET'S GO **ALFYDWI**



SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel







Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Drusan Toyota lebih mudah!

Bontang



Perjanjian kerjasama DPKD Kaltim dan DPKD Kaltara.

DPKD Kaltim dan Kaltara Saling Perkuat Kerjasama Peningkatan Layanan dan Informasi

SAMARINDA - Untuk memperkuat komitmen pengembangan Centre Of Excellent Layanan Perpustakaan Dan Informasi Budaya Lokal Kalimantan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), bersama DPKD Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Ir. Yosua Batara Payangan, ST, M.Si, dan Kepala Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama, DPK Kaltim Dra. Hj. E. Mustika Wati, MM. Di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan

Utara pada 7 September 2023 lalu.

"Perjanjian sebagai bentuk tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya, pada Juli kemarin, pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Centre of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno di Aula DPK Kutai Kartanegara," ungkap Mustika kepada Mediakaltim.com.

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan bukti komitmen DPKD Kaltim untuk melakukan kerjasama secara tertulis dengan DPKD Kalimantan Utara.

"Ini tindak lanjut dari pertemuan waktu itu di Kukar, kita buat perjanjian dengan seluruh DPKD Se-Kalimantan," ujarnya.

Diketahui pada Juli lalu, seluruh DPKD Se-Kalimantan melakukan Pertemuan di Kukar, pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Centre of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno di Aula DPKD Kutai Kartanegara. Dengan menghasilkan penandatanganan kerjasama antara lima provinsi di Pulau Borneo dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan warisan budaya melalui naskah kuno di Kalimantan. (adv)

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



HUMAS DPKD KALTIM

Deputi Bidang Konservasi Kearsipan, Dr.Kandar (kiri bawah) Kepala DPK Kaltim, Drs. Muhammad Syafranuddin,MM (Kanan bawah). Saat sesi foto bersama acara Bimbingan Bimtek Risk Assesment di Aula PDKD Kaltim.

Arsip dan Naskah Kuno Harus Dipelihara sesuai Standar

SAMARINDA - Dalam pemeliharaan naskah kuno harus dilakukan sesuai standar. Palsanya, jika itu diabaikan maka akan berbahaya dan merusak arsip tersebut. Jika rusak, maka sejarahpun akan ikut menghilang.

Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Konservasi Kearsipan, Dr.Kandar, MAP, beberapa hari yang lalu saat menyampaikan materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Risk Assesment di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (PDKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kalau naskah arsip hilang atau rusak sejarah juga rusak," jelas Kandar.

Kandar menyebutkan Penilaian Risiko atau RiskAssesment, adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan.

"Oleh sebab itu kita harus tahu cara mendiagnosis arsip akan dirawat dengan metode apa, karena perhatian terhadap naskah kuno harus dipelihara sesuai standar," paparnya.

Menyetujui pemaparan Kandar, Kepala DPK Kaltim, Drs. Muhammad Syafranuddin,MM berterima kasih kepada ANRI, karena menurutnya naskah kuno dan arsip merupakan aset yang perlu terjaga.

"Terima kasih kepada ANRI, sekali lagi naskah kuno dan arsip merupakan aset yang perlu kita jaga bersama keberadaannya," ucap pria yang akrab disapa Ivan tersebut. (adv)





Rangkaian kegiatan kunjungan BPSDM DKI Jakarta

Kunjungi BPSDM Kaltim, Peserta PKA BPSDM DKI Jakarta Pelajari Inovasi Pelayanan Administrasi

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menjamu kunjungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (12/8/2023) sore. Kunjungan tersebut dalam rangka studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ASN DKI Jakarta.

Dalam jamuan tersebut, hadir mewakili Gubernur Kaltim Setda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Kabid PKMF Rina Kusharyanti dan Pimpinan Rumah Sakit Dr Kanujoso Balikpapan. Sedangkan dari pihak BPSDM DKI Jakarta hadir Kepala Bidang Pengembangan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Indang Murniningsih beserta rombongan peserta PKA

yang berjumlah 33 orang.

Dalam sambutannya, Indang mengatakan tujuan dari datangnya peserta PKA BPSDM DKI Jakarta ke Kaltim adalah untuk belajar inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Pemprov Kaltim.

"Kami senang memilih Kaltim, karena banyak inovasi yang perlu digali di sini, dua locus Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Simpator, yang sempat menjadi top inovator 2022. Kami juga mau melihat inovasi e-Samsat dalam genggaman, inovasi sidokter yang dikembangkan RS Kanujoso Balikpapan, banyak yang perlu digali agar nanti banyak ilmu yang bisa dibawa pulang ke Jakarta," akunya.

Selain menambah wawasan dari daerah lain, Indang mengatakan tujuan datangnya peserta PKA langsung ke lokasi agar dapat men-

gidentifikasi lapangan. "Tujuan ke lapangan agar mampu melihat perubahan secara langsung," ujarnya.

"Oleh sebab Ibu Sekda dan Ibu Kepala BPSDM bisa berkenan menerima kami dalam kerjasama dalam kami menggali ilmu di sini," tambahnya.

Sementara itu, Setda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni, mengucapkan selamat datang kepada Ibu Indang dan rombongan PKA.

"Selamat datang Ibu Indang dan rombongan, nanti kalau ada waktu kita bisa keliling sungai Mahakam naik kapal di sini untuk menikmati panorama sungai Mahakam dan beserta kuliner ikan sungainya," ucap Sri. (adv)

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi

BPSDM Kaltim Gelar Orientasi bagi 2.330 PPPK

SAMARINDA - Berdasarkan informasi yang dirilis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), saat ini tengah menjalankan Orientasi untuk 2330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung hingga 12 September 2023 ini.

Para peserta yang ikut dalam kegiatan orientasi ini, merupakan para pegawai berstatus PPPK kelas Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim.

“Untuk PPPK kelas Provinsi yang

diangkat oleh BKD tahun 2022, kita sudah orientasikan semuanya di tahun 2023 ini. Untuk kelas kabupaten/kota juga sudah sebagian. Sampai Desember nanti tinggal beberapa angkatan Kabupaten/kota saja lagi belum orientasi,” ungkap Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, saat dikunjungi MediaKaltim.com di kantornya Selasa (12/9/2023).

Nina Dewi mengatakan, yang sudah ikut PPPK saat ini mayoritas berprofesi sebagai guru.

“Dalam data tersebut mayoritas adalah berprofesi sebagai guru,

selebihnya adalah tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya,” ujarnya.

Nina Dewi juga menekankan, untuk semua PPPK yang telah menjalani orientasi di BPSDM Kaltim, agar menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, agar mampu bersaing serta berkualitas.

“Menjadi PPPK yang baik, harus memiliki sikap disiplin, inovatif, kreatif dan bekerja ikhlas,” tutupnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Kaltim untuk Tekan Angka Stunting

SAMARINDA – Target menurunkan angka stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi benang merah dalam pelaksanaan Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim di Hotel Ibis, Senin (11/9/2023).

Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita (end-user) mengacu pada pedoman sejak Tahun 2019.

Kepala Dinkes Kaltim Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp. KJ, M. Kes, MARS, pada momen tersebut menekankan bahwa pada 2020 dan 2021, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan revisi pada pedoman dan buku bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Modul Gizi Buruk. Untuk memberikan tatalaksana balita sakit secara komprehensif sesuai pedoman tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas bagi fasilitator dan tenaga kesehatan pelayanan kesehatan pada anak di Puskesmas agar sesuai dengan standar.

"Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita kurang gizi (underweight) dari 16,6% menjadi 14,7%, penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 11,6% menjadi 7,5%, penurunan prevalensi balita gemuk (overweight) dari 12,6% menjadi 9,4%, namun terjadi peningkatan



DOK. DINKES KALTIM

Peserta Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim.

prevalensi balita pendek dari 27,6 % menjadi 29,4%," paparnya.

Sementara itu, pada Riskesdas 2018, ia menunjukkan capaian kinerja gizi yang masih kurang optimal seperti proporsi BBLR pada anak 0 - 59 bulan sebesar 7,1%, proporsi risiko KEK pada ibu hamil sebesar 11,5%, persentase IMD pada bayi dan anak usia 0-23 bulan sebesar 66,1%, persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 55,2%, dan persentase balita yang mendapat vitamin A mencapai 55,7%.

"Hasil Survei Status Gizi Balita tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan prevalensi stunting mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,1% dari tahun 2021 sebesar 26,4%. Prevalensi gizi kurang (wasting) dari 7,1% menjadi 7,7%. Prevalensi underweight dari 17,0% menjadi 17,1%. Adanya peningkatan masalah gizi untuk 3 indikator," sebutnya.

Menurutnya, balita gizi buruk masih ditemukan di beberapa tempat, baik dalam bentuk kwashiorkor, ma-

rasmus, atau marasmus kwashiorkor. Hal ini merupakan masalah yang perlu dicegah dan ditanggulangi bersama. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan secara profesional sesuai kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita agar tenaga kesehatan mampu melakukan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita.

"Kami menyambut baik diadakannya kegiatan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit yang nantinya diharapkan setelah kegiatan ini peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini," harapnya. (RLS/RS1)

Editor: Adhi Abdhian



Dinkes Kaltim Target Turunkan Stunting

SAMARINDA – Pelatihan dan Tata Laksana Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Timur 2023 Angkatan II yang digelar 4 - 9 September 2023, menjadi momen penting bagaimana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyerasi penanganan Stunting di Bumi Etam.

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kaltim Dr.dr.H.Jaya Muallimin, Sp.KJ,M.Kes,MARS, menjelaskan, sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target indikator pembangunan kesehatan adalah menurunkan stunting menjadi 14% dan menjadi 7% pada tahun 2024.

Secara luas ia menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita (triple burden) yaitu stunting dan wasting, overweight, serta defisiensi zat gizi mikro (Global Nutrition Report, 2018).

"Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 terdapat 10,2% balita wasting

atau kasus gizi kurang, 3,5% di antaranya severe wasting atau gizi buruk," sebutnya.

Ditambahkan, tingkat kematian dan kesakitan anak dengan gizi buruk lebih tinggi dibanding anak dengan gizi baik. Menurutnya, perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang.

"Kasus gizi buruk masih banyak ditemui di masyarakat, namun kasus yang dilaporkan dan yang mendapat perawatan masih rendah," katanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan antara lain karena, terbatasnya akses layanan kesehatan, belum banyak fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan balita sakit secara integratif sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi.

Kemudian, ketidakmampuan pemberi layanan dalam tata laksana gizi buruk, dan pelaporan yang tidak lengkap.

"Terakhir, dikarenakan rendahnya kesadaran keluarga untuk membawa balita gizi buruk ke tempat pelayanan kesehatan," jelasnya.

Untuk itu Dinkes tak tinggal diam. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

"Serta adanya program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita atau end user yang mengacu pada pedoman sejak tahun 2019," paparnya. (rls/adv)

Editor : Adhi Abdhian



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Akselerasi Program TP PKK

JAKARTA - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau, Sri Aslinda Gamalis, bersama ketua TP PKK Se Indonesia menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) tahun 2023 di Ballroom Bidakara Jakarta, Senin (11/9/2023). Rakornas dibuka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dan turut dihadiri Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Rakornas 2023 mengusung tema terus berkontribusi untuk Indonesia maju.

Gelaran Rakornas ini fokus pada upaya akselerasi program PKK untuk mencapai rencana induk gerakan PKK 2021-2024. Selain dihadiri ketua TP PKK Provinsi, serta Ketua TP PKK

kabupaten dan kota se Indonesia. Rakornas juga diikuti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi se Indonesia.

Ketua TP PKK Berau, Sri Aslinda Gamalis, usai mengikuti rakornas, mengungkapkan beberapa point penting yang telah dipaparkan dari ketua umum kementerian/lembaga dalam mensinergikan program PKK. Rakornas ini disebutkannya bertujuan agar tersosialisasikannya kebijakan kelembagaan dan program kerja PKK hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara operasional kepada daerah. "kegiatan ini juga untuk mengintegrasikan perencanaan

dan pelaksanaan 10 program Pokok PKK, serta terwujudnya hubungan yang harmonis antara TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota," ungkapnya.

TP PKK Berau, disampaikannya memberikan memiliki komitmen dalam menjalankan program dengan mengoptimalkan peran kader hingga ke tingkat kelurahan, kampung dan dasawisma. Tentu dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja PKK. "Tentu apa yang menjadi harapan PKK pusat, menjadi komitmen dan perhatian kita di daerah dalam menjalankan 10 program pokok PKK," tandasnya. **(RN/Prokopim/dez)**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Hasil Panen Minim, DPRD Berau Dorong Pemerintah Adakan Pupuk Subsidi

TANJUNG REDEB - Sulitnya para petani di Bumi Batiwakkal memperoleh pupuk menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menuturkan, para petani juga mengeluhkan soal mahalannya harga pupuk. Sebab dapat berimbas terhadap hasil panen mereka.

Diungkapkannya, sebagai wakil rakyat dirinya menyaksikan langsung kondisi di lapangan bagaimana petani mengeluh terkait hal tersebut. Ia sendiri berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan para petani.

"Dari hasil reses banyak warga mengeluh soal langkanya pupuk belum lagi harganya yang mahal. Pasti berdampak pada produksi pertani-

an," katanya, Selasa (12/9/2023).

Terlebih, dari data yang ada pada 2021-2022 terdapat 38,70 ton padi per hektare dan sampai di tahun 2022-2023 terjadi penurunan menjadi 33,90 ton per hektare.

Pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan para petani. Seperti, koordinasi dengan instansi terkait hingga menggunakan mekanisme dana aspirasi miliknya. Yang tentunya harus melewati berbagai mekanisme yang ada.

"Namun saya pastikan, saya akan menindaklanjuti permasalahan ini hingga tuntas," tegasnya.

Ia meminta, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus

terkait merosotnya jumlah produksi panen petani tersebut. Baik itu berupa pupuk bersubsidi ataupun non subsidi yang mudah didapatkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat membuat terobosan agar memudahkan petani mendapatkan pupuk. Serta bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan pupuk bersubsidi segera.

"Karena memang salah satu penghambat turunnya produksi padi dari petani, yaitu susahnyanya mendapatkan pupuk," pungkasnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Rumah jabatan Bupati Berau bakal dilakukan rehabilitasi senilai Rp 677 juta.

Rehab Rumah Jabatan Bupati Berau Telan Rp 677 Juta, Saga: Pekerjaan Harus Maksimal

TANJUNG REDEB - Anggaran sebesar Rp 677 Juta digelontorkan untuk kerusakan minor rumah jabatan Bupati Berau. Hal itu pun direspons positif oleh Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga. Diketahui, perbaikan dilakukan untuk memperbaiki atap yang bocor dan kamar mandi laki-laki.

Saga menuturkan, perbaikan tersebut memang sudah direncanakan. Bahkan usulan perbaikan rumah jabatan Bupati Berau merupakan salah satu inisiasinya. Terlebih, rehabilitasi terakhir dilakukan 4 tahun silam.

Dia membeberkan, sebelumnya anggaran untuk rehabilitasi sekisar Rp 200 juta. Namun, dinilainya den-

gan dana sebesar itu pekerjaan tidak akan maksimal.

“Maka dari itu saya mendorong agar alokasi anggaran untuk rehab rumah jabatan bupati dinaikkan. Apalagi rehabilitasi ini tidak dilakukan setiap tahun, tetapi sesuai kondisi, seperti rumah dinas itu. Memang saya sarankan di rehab lagi, karena belum maksimal pada saat itu Rp200 jutaan,” jelasnya, Selasa (12/9/2023).

Dengan anggaran yang cukup besar, kata Saga, diharapkan pengerjaan dapat maksimal, sehingga tidak lagi diusulkan dalam tahun-tahun berikutnya.

“Kita harapkan dengan yang biaya besar untuk rehab ini dapat maksi-

mal, jangan hanya seadanya. Jadi kita minta kalau biaya besar dimaksimalkan,” tegasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai kemampuan anggaran mencukupi. Terlebih APBD Berau pada tahun 2023 ini mencapai Rp 5,1 triliun.

“Berkaitan anggaran kita, wajar saja karena anggaran kita murni dan perubahan totalnya mencapai sekitar Rp 5 triliun. Dengan dana besar rehabnya jangan asal-asalan,” tandasnya. **(mnz/dez)**

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, AKP Hendri Saragi saat menunjukkan TKP bayi 1,5 tahun terjatuh.

Polisi Amankan Pengasuh Balita 1,5 Tahun yang Tewas di Sepinggian

BALIKPAPAN - Polsek Balikpapan Selatan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian bayi berusia 1,5 tahun berinisial T1 di Jalan Marsma R Iswahyudi RT 10 Kelurahan Sepinggian Raya, Balikpapan Selatan.

Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, AKP Hendri Saragi mengatakan, saat ini Polsek Balikpapan Selatan pun telah menahan pengasuh bayi berinisial NK (26) yang menyebabkan kematian bayi tersebut.

"Saat ini kita masih mintai keterangan pengasuhnya. Selain itu sejumlah saksi-saksi juga sudah kita mintai keterangan," ujarnya saat ditemui di Makpolsek Balikpapan Selatan, Se-

lasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Saragi menjelaskan, pihaknya saat ini juga masih menunggu hasil visum dan pemeriksaan lainnya dari jasad korban di RS Bhayangkari.

"Perkembangannya belum ada. Semalam baru divisum sama rumah sakit. Mungkin hasilnya bisa semingguan," jelasnya.

Terkait orang tua bayi yang meninggal, pihak kepolisian pun sudah berhasil menemukannya. Dan saat ini kondisinya masih emosional, karena mengetahui sang anak telah meninggal dunia.

"Jadi ibunya semalam sudah kita temui dan komunikasikan. Cuma ma-

sih sedikit emosi, karena anaknya kan meninggal," tambah Saragi.

Disinggung mengenai pengasuh yang membiarkan bayi tersebut meninggal dan baru dilaporkan sehari setelahnya, Saragi menjelaskan, jika saat itu pengasuhnya bingung, ketakutan dan tak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit.

"Pas kita tanya itu dia panik dan takut. Selain itu juga nggak punya uang mau bawa ke rumah saki. Makanya dia diam aja," tutup Saragi.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani menunjukkan tersangka dan barang bukti badik yang di gunakan tersangka.

Sering Dimaki “Anjing”, Pria ini Tikam Rekan Kerja hingga Tewas

BALIKPAPAN - Polsek Balikpapan UtarabersamaJatanrasPoldaKaltim dan Polresta Balikpapan berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Km 18 tepatnya di RT 39 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara pada Senin (4/9/2023) sekitar pukul 11.20 Wita.

Pelaku berinisial SK (47) ditangkap tiga hari setelah kejadian di kawasan Km 39 RT 11 Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara di area perkebunan sawit milik saudaranya.

Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani mengatakan, korban dan pelaku adalah rekan kerja. Bahkan satu daerah yang berasal dari pulau Sulawesi. Namun, karena ucapan korban yang membuat sakit hati pelaku, maka terjadilah peristiwa naas tersebut.

“Motifnya pelaku ini sakit hati. Korban katanya sering mengatai kata-kata kasar yang membuat pelaku

sakit hati dan terjadilah perselisihan keduanya,” ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Kapolsek Balikpapan Utara menjelaskan, bahwa keduanya pernah berselisih paham juga. Namun keduanya telah didamaikan oleh pihak perusahaan.

“Sebelumnya mereka ini sudah pernah juga berselisih paham. Tapi didamaikan oleh perusahaan. Cuma kayanya ini belum tuntas dan berlanjut sampai kejadian itu,” jelasnya.

Saat kejadian pelaku SK menikam korban SH (46) sebanyak 6 kali. Yakni di bagian dada kanan, perut kiri, punggung kiri atas, punggung kiri bawah, paha kaki kiri, dan siku tangan kiri.

“Korban dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Ditubuh korban banyak terdapat luka tusuk dari benda tajam yakni badik,” tambah Bitab Riyani.

Sementara itu pelaku SK saat dimintai keterangannya mengaku sakit

hati lantaran sudah terlalu sering dikata-katai binatang oleh korban. Bahkan saat sebelum kejadian, ia sempat di pukul menggunakan benda tumpul di bagian kepalanya.

“Sering dibilangin aku ini babi lah, anjing lah, yang bikin emosi aku dibilangin kalau aku lahir dari binatang bukan manusia,” ujarnya.

SK yang sudah tersulut emosi pun langsung menikam SH secara brutal. Bahkan korban sempat lari, namun tetap dikejanya hingga korban tersungkur dan tak berdaya.

“Nggak tahu berapa kali saya tusuk. Saya emosi sudah. Pas dia sudah nggak bangun saya pergi,” jelasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi pun menyangkakan pasal 338 KUH Pidana terhadap pelaku. Dimana ancaman kurungan penjaranya hingga 7 tahun.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG

Beras di Pasar tradisional Rawa indah.

Petani Jawa Gagal Panen, Harga Beras Makin Melonjak

BONTANG - Awal tahun 2023 lalu harga beras terus meningkat disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat menyambut hari-hari besar.

Namun pada awal Agustus lalu, harga beras ternyata kembali melonjak. Menurut salah satu supplier beras di pasar tradisional Rawa Indah menjelaskan kenaikan beras kali ini dinilai cukup tinggi.

"Sebelumnya harga beras 25 Kg sudah Rp 308 ribu sampai Rp 310 ribu, setelah Lebaran nggak turun, malah naik," Ungkap Nisa penjaga toko Supplier beras, Selasa (12/9/23).

Harga beras 25 Kg kini menca-

pai Rp 330 ribu hingga Rp 350 ribu, sementara itu untuk beras kiloan di supplier paling murah yakni Rp. 12.5 ribu.

Nisa menjelaskan lonjakan tersebut diakibatkan beras yang berada di pulau Jawa mengalami banyak yang gagal panen, sehingga petani beras harus mengambil beras dari pulau Sulawesi untuk kembali di kirim ke Kalimantan. "Karena gagal panen, yang di Jawa ambil beras ke Sulawesi, makanya naik sekali," ujarnya.

Salah satu penjual beras yang juga berada di pasar tradisional Rawa Indah, Ibu Andi mengeluh lantaran sejak awal tahun harga beras terus

meningkat. "Naik sekali harga beras, tapi memang katanya asli Sulawesi, saya juga ambil di supplier sebelah," jelasnya.

Untuk harga besar yang ia jual qkqn lebih mahal dari harga supplier, karena sudah naik sangat jauh, ia hanya mengambil untung sebanyak Rp. 2 ribu. Untuk pembelian beras diakui lebih banyak yang langsung ke supplier. "Ada saja yang beli pasti, karena kebutuhan sehari-hari, tapi karena naik kadang orang ke supplier," ungkapnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Bupati Kukar, Edi Damansyah, saat menerima penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik dari Kompas TV.

Inovasi DiSAPA Mengantar Kukar Raih Penghargaan dari Kompas TV

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memahami betul cara memanfaatkan era keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pelayanan masyarakat di wilayah Kukar. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah melalui inovasi Program DiSAPA (Digitalisasi Pelayanan Publik).

Program DiSAPA ini telah diterapkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar. Dengan membangun situs web, semua informasi dan layanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam era keterbukaan saat ini.

Inovasi ini mendapat pengakuan tingkat nasional dengan menerima Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik dalam acara malam puncak perayaan HUT ke-12 Kompas TV yang bertajuk "Indonesia 12aya."

"Jadi semua informasi dan layanan

tersebut telah tersedia dalam format digital melalui program DiSAPA ini," ungkap Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Senin (11/9/2023) malam.

Penghargaan untuk keterbukaan informasi publik diberikan kepada lima daerah yang dinilai memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Edi Damansyah menerima Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik ini bersama dengan empat kepala daerah lainnya, yaitu Kabupaten Talaud, Kota Probolinggo, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Tapin.

Selain itu, Kompas TV juga memberikan empat penghargaan lainnya, seperti Apresiasi Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata kepada Kota Balikpapan, Kabu-

paten Jember, Kota Makassar, Kota Malang, dan Kabupaten Minahasa Utara. Serta Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal kepada Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Anugerah Apresiasi Daerah Peduli Penanganan Stunting dan Layak Anak diberikan kepada Kota Lampung, Kabupaten Blora, Kabupaten Jember, Kota Mojokerto, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Semarang. Terakhir, Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik diberikan kepada Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Marowali Utara, Kabupaten Puncak Papua, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Tangerang Selatan.

Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Agus Susanto



Pasutri siri ditangkap polisi.

Pasutri Asal Batu Sopang Ditangkap, Miliki Sabu 5,94 Gram

PASER - Pasangan suami istri (Pasutri) siri asal Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, diamankan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Paser, Jumat (8/9/2023).

Pengamanan itu setelah pria berinisial A (36) dan perempuan L (33) kedapatan memiliki sabu sebesar 5,94 gram. Hal itu diketahui, setelah Aparat Penegak Hukum (APH) menggeledah rumah keduanya yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi menyatakan, penggeledahan itu dilakukan setelah pihaknya mendapati informasi dari masyarakat. Dari informasi itu, petugas

melakukan penyelidikan dan menangkap dugaan kasus tersebut.

"Kami lakukan penggeledahan dini hari tepatnya pukul 03.00 Wita di rumah yang kami dapati informasinya sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu," kata AKP Suradi saat diwawancarai di ruangannya, Selasa (12/9/2023).

Adapun sabu yang didapati dengan berbagai macam ukuran yang dikemas dalam 8 paket. Selain paket sabu, petugas juga menemukan 2 buah sendok takar, 1 unit timbangan digital, plastik klip serta uang tunai senilai Rp 1,5 juta yang turut dijadikan barang bukti.

"Ada juga tas selempang yang menyimpan barang bukti, 1 unit sepeda motor para pelaku dan 2 unit

telepon genggam yang kami juga amankan," tambah Suradi.

Suradi menyebut, saat penggeledahan petugas juga memanggil pihak Rukun Tetangga (RT) sebagai saksi mata. Keduanya diduga merupakan pengedar di kawasan setempat. Akibat perbuatannya, petugas menggiring para pelaku ke Polres Paser.

Kini para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti diamankan. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pewartu : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIA KALTIM GROUP

Rapat evaluasi Pemkab PPU dan BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, Selasa (12/9/2023).

Program Bantuan BPJS Ketenagakerjaan di PPU Capai 6 Ribu Peserta

PPU - Bantuan jaminan kesehatan bagi pekerja rentan di Penajam Paser Utara (PPU) terus diperluas. Pada semester kedua tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kembali menjaminkan 5.000 peserta masuk dalam program tersebut.

Program Pemkab PPU ini diyakini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terungkap setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama semester pertama tahun 2023.

"Saat melakukan evaluasi terkait BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten PPU, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk unit-unit kerja yang beroperasi di Kabupaten PPU," ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, usai memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di PPU pada Selasa (12/9/2023).

Jaminan kesehatan ini diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Tohar menekankan pentingnya

melakukan evaluasi bersama di lapangan untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan konsistensi daerah terhadap jaminan ketenagakerjaan ini, baik dalam aspek kesehatan maupun hal lainnya.

"Saya berharap agar link (jaringan) BPJS Ketenagakerjaan dapat dimaksimalkan. Meskipun berbeda dalam cakupan tugas, tujuan kita satu, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran untuk 1.000 pekerja dalam APBD murni, dan kemudian menambahkannya menjadi 5.000 peserta dalam APBD perubahan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, Muhammad Fanani, menyatakan bahwa saat ini jumlah peserta program tersebut tersebar di empat kecamatan. Target bersama dengan pemerintah daerah adalah mencapai total sekitar 15 ribu peserta pada tahun 2024.

"Melihat perkembangan ini, kami

sangat mengapresiasi Pemda PPU atas inisiatif daerah yang sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di daerah ini," ungkapnya.

Selain program untuk pekerja rentan, Fanani juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam pembahasan untuk kerja sama terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi non-ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU.

"Kami telah melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemda PPU mengenai beberapa aspek, termasuk progres pelaksanaan jaminan kesehatan ketenagakerjaan di PPU," bebernya.

"Kami akan terus memberikan laporan berkala mengenai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan, yang telah dibayarkan, serta perkembangan klaimnya," tutupnya. (SBK)



Bupati PPU Hamdam menyerahkan stiker tanda pemasangan 100 SR ke warga Kerok Laut Penajam, Selasa (12/9/2023).

Progres Perluasan Layanan Air Bersih Bantuan Australia Capai 80 Persen

PPU - Progres perluasan layanan air bersih di Kecamatan Penajam telah mencapai 80 persen. Target penyelesaian program bantuan dari Australia ini dijadwalkan pada akhir September ini.

Bantuan dengan nilai sebesar Rp 1,015 miliar ini difokuskan pada wilayah Kerok Laut, Kelurahan Penajam. Sebanyak 100 sambungan rumah (SR) dibangun di sana.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda AM) Danum Taka, Abdul Rasyid, mengatakan bahwa sambungan ini diberikan kepada masyarakat pesisir yang belum memiliki akses layanan air bersih.

"Progres pemasangannya telah mencapai 80 persen, dan kami menargetkan agar dapat berfungsi maksimal pada September 2023 ini. Jadi, dalam waktu dekat, fasilitas

ini dapat beroperasi, sedang dalam proses penyelesaian," ungkapnya pada Selasa (12/9/2023).

Dijelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari perluasan jaringan perpipaan hingga pembangunan gedung pelayanan. Selain itu, Perumda AM Danum Taka juga melaksanakan pengadaan pompa booster dan pompa chemical serta perluasan bangunan pelayanan.

Sebagai informasi, hingga saat ini cakupan pelayanan air bersih oleh pemerintah daerah di seluruh PPU baru mencapai 31 persen. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, menyatakan bahwa perluasan jaringan air bersih tetap akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 ini, tidak ada penambahan jaringan

dengan skala besar. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada program sambungan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Semoga pada tahun depan, kami dapat melaksanakannya dalam jumlah yang cukup besar," katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kembali 5.000 sambungan rumah kepada pemerintah pusat pada tahun 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan sambungan air bersih bagi masyarakat.

"Secara bertahap, kami berupaya memenuhi wilayah lainnya," pungkas Hamdam. (SBK)



DPRD Kaltim saat pelaksanaan Rapat Paripurna.

Permendagri Penetapan Pj Gubernur Disebut Aturan “Banci”

SAMARINDA - DPRD Kaltim telah mengirim lima usulan nama Calon Penjabat Gubernur Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri RI. Nama yang dikirim merupakan hasil usulan dari seluruh fraksi di DPRD Kaltim.

Semestinya DPRD Kaltim, cukup mengusulkan tiga nama saja bila mengacu pada Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang aturan teknis pengangkatan Pj Kepala Daerah.

Fraksi Demokrat - NasDem DPRD Kaltim bahkan mengusulkan untuk melakukan voting dilakukan seluruh Legislator DPRD Kaltim untuk mencapai tiga nama. Namun berdalih mengakomodir semua usulan fraksi, dan berdasar Rapat Pimpinan (Rapim), Ketua DPRD memutuskan membawa lima nama.

“Kita kirim tiga pun belum tentu disetujui, makanya kita kirim semua. Tetap saja dari kemarin-kemarin semua dari pusat. Kalau pun ada yang terpilih dari sekda itu sudah dititip di situ,” ucapnya.

Hasan juga menilai Permendagri yang ditetapkan 4 April 2023 tersebut masih memiliki celah yang harus dibenahi. Karena tidak ada diatur siapa yang dapat menjadi asesor untuk melakukan penilaian.

“Agak banci sih aturan itu, karena

kita nggak ada orang sebagai asesor tetap kembali ke pusat, mendagri tapi dari presiden,” tegasnya.

Sebagai informasi, berikut adalah lima nama yang menjadi usulan DPRD Kaltim untuk menjadi Pj Gubernur Kaltim, gantikan Isran Noor yang akan habis masa jabatannya 1 Oktober mendatang.

1. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Drs. H. Alimuddin, M.Si
2. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin
3. Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si
4. Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, M.PP
5. Rektor Universitas Mulawarman Prof. Ir. Abdunnur

Akademisi Universitas Mulawarman, dari Fakultas Hukum, Warkhatun Najidah, memberikan tanggapannya terkait Permendagri tentang Pj Kepala Daerah.

Menurutnya peraturan tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan siapa yang akan menyambung roda pemerintahan yang akan ditinggalakan Kepala Daerah yang notabenehnya dipilih oleh masyarakat.

Seolah-olah dalam Permendagri hubungan yang terjadi hanya terjadi antara Kemendagri dan DPRD Kaltim saja tanpa melibatkan masyarakat dan lembaga lainnya. Terlebih dalam aturan teknis tersebut, tidak ada uji kepatutan dan uji kelayakan dalam proses seleksi Pj Gubernur.

“Pj sangat strategis, sistemnya saja tidak lengkap. Itu yang membuat hari ini pola hubungan pusat dan daerah itu tidak equality,” pungkasnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor sendiri, turut angkat bicara terkait siapa yang akan menggantikannya dalam mengisi kekosongan jabatan KT1. Ia berharap, tidak ada unsur politik dalam penentuan Pj Gubernur Kaltim.

Siapapun Pj Gubernur Kaltim, menurutnya, harusnya adalah sosok yang mampu melanjutkan program kerja semasa kepemimpinannya.

“Jangan bernuansa politis, tapi kepentingan program, itu saja. Program sudah ada, tinggal jalan. Mau dilanjut atau tidak. Hampir semua yang diprogramkan itu semua prioritas,” tutup Isran.

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (kiri), bersama Gubernur Kaltim Isran Noor.

Optimisme Wakil Ketua DPRD: Tidak Akan Ada Kekosongan Jabatan di Kaltim

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, yakin tidak akan ada kekosongan jabatan atau bahkan status quo dalam roda pemerintahan di Provinsi Kaltim.

Penegasan ini menjawab pertanyaan Media Kaltim terkait kemungkinan lambannya proses penetapan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Samsun optimistis bahwa Kemendagri saat ini tengah berproses untuk menetapkan Pj Gubernur

Kaltim dan tidak akan ada status quo. Status quo sendiri adalah kondisi yang tetap, tidak ada perubahan apa pun.

"Nama sudah kita usulkan, rapat atau seleksi di sana (Kemendagri) juga sedang diproses, tidak mungkin ada status quo. Kalaupun ada dalam kondisi darurat masih ada sekda yang menjalankan pemerintahan," tegasnya usai Rapat Paripurna, Selasa (9/9/2023).

Terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kaltim, bila belum ada Pj Gubernur Kaltim sendiri dinilai

Samsun juga tidak akan terjadi.

Politisi PDI Perjuangan ini yakin betul bahwa akan ada nama yang ditetapkan sebagai Pj Gubernur sebelum masa jabatan Isran-Hari berakhir pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Plt pun harus ada SK. Saya yakin itu pasti selesai, banyak yang memikirkan hal itu. Untuk namanya kita tunggu, kalau sudah ada Pj, kita akan mengumumkannya. Setelah keluar SK Kemendagri mengenai Pj-nya, pasti akan kita sampaikan," pungkasnya. (eky)

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

MEDIA KALTIMTARA

RABU,
13 SEPTEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



PEMROV KALTARA RAIH PENGHARGAAN "INDONESIA 12AYA" KOMPAS TV

BACA HALAMAN 2-3



PENEMUAN MAYAT PRIA GEGERKAN WARGA TARAKAN

BACA HALAMAN 10



Pemprov Kaltara Raih Penghargaan "Indonesia 12aya" Kompas TV

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan dalam acara malam puncak "Indonesia 12aya" yang merupakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kompas TV. Penghargaan ini diterima di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, pada, Senin (11/9/2023) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr.

H. Suriansyah, M.AP., yang mewakili Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menerima penghargaan kategori "Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal" secara langsung dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Sekprov Suriansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah

yang telah bekerja keras bersama-sama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia di Kaltara.

"Terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam mengembangkan program kegiatan untuk memberdayakan UMKM dan memperjuangkan kemajuan daerah kita," ujar Sekprov Kaltara, Suriansyah.



Pemprov Kaltara, lanjut Sekprov, memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan UMKM dan memanfaatkan sumberdaya lokal. Hal ini terbukti saat pandemi Covid-19, di mana Pemerintah Provinsi Kaltara terus mendorong penggunaan dan konsumsi hasil bumi Benuanta dengan bangga.

“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal, terutama UMKM, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Per-

gub) tentang Penggunaan Pangan Lokal, Batik Khas daerah Kaltara,” jelasnya.

Namun, dalam setiap penyelenggaraan event-event, Pemerintah Provinsi Kaltara selalu aktif melibatkan UMKM dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Sekprov Suriansyah berharap UMKM dan sumber

daya lokal di Kaltara dapat terus tumbuh dengan kualitas tinggi dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

“Harapan kami adalah agar UMKM kita dapat menjadi lebih mandiri, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kaltara, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya. (dkisp)



Dispusip Berau ingin Taman Sanggam menjadi tempat wisata pendidikan.

17 Program Disiapkan Dispusip Berau, Berharap Dongkrak Kekayaan Literasi

TANJUNG REDEB - Keseriusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau untuk mewujudkan perpustakaan menjadi lokasi layak kunjung terus ditampakkan, hal itu melalui 17 program yang disiapkan.

Kepala Dispusip Berau, Yudha Budi Santosa menyebut, 17 program dan beberapa kegiatan yang disiapkan pihaknya telah disampaikan kepada Bupati.

"Seluruh program yang kami siapkan itu sebagai upaya meningkatkan minat baca sekaligus kunjungan ke perpustakaan," katanya, Selasa (12/9/2023).

Dirinya mengaku program yang

utama adalah mengintegrasikan Taman Sanggam yang berada tepat di sebelah kantor Dispusip Berau menjadi areal taman baca.

"Selain membaca buku di perpustakaan yang ada di kantor Dispusip Berau, pengunjung juga mendapat pengalaman yang menarik, yakni membaca buku dengan suasana santai di Taman Sanggam," tuturnya.

Yudha menambahkan, program lainnya adalah menata ruangan baca khusus anak, penambahan studio bioskop mini, hingga menggelar lomba literasi.

"Kami juga membuka program donasi buku, baik dari instansi maupun

perorangan. Hal itu sebagai upaya menambah judul dan jumlah buku di perpustakaan kami," paparnya.

Dia juga membeberkan bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya menerbitkan kamus Bahasa Berau, dengan harapan dapat menjadi muatan lokal dan menambah kekayaan literasi di kabupaten paling utara Kaltim ini.

"Seluruh program tersebut akan direalisasikan secara bertahap, yang diusulkan sebagai program jangka tengah dan pendek, sembari mendukung visi serta misi pembangunan hingga 2026 mendatang," pungkasnya. (adv/and)



Dispusip Berau terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan pasca pandemi Covid-19.

Pasca Covid-19, Dispusip Berau Berupaya Tingkatkan Jumlah Kunjungan

TANJUNG REDEB - Pasca pandemi Covid-19, kunjungan di Perpustakaan Umum Berau berangsur pulih. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau, Yudha Budi Santosa.

Dia mengatakan, jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Berau mulai normal kembali. Namun, Yudha tetap optimis angka kunjungan terus meningkat.

Dirinya memaparkan, berbagai upaya untuk memicu meningkatnya angka kunjungan ke Perpustakaan Umum Berau telah dilakukan. Seperti memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan perpustakaan.

"Hal itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kami terus berupaya memberi fasilitas yang sifatnya digital, seperti pengelolaan yang sudah menggunakan ITE," terangnya, Selasa (12/9/2023).

Selain berinovasi dengan memberikan pelayanan secara digital, Yudha juga menyebut saat ini Perpustakaan Umum Berau memiliki buku digital yang dapat diakses kapan dan dimanapun oleh seluruh masyarakat. "Dengan menarik minat baca, salah satu upaya untuk mencerdaskan masyarakat."

Kita terus upayakan peningkatan jumlah kunjungan dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang nyaman bagi masyarakat," tegasnya.

Dirinya memaparkan, selain di wilayah perkotaan, pihaknya juga berupaya memajukan literasi di perkampungan, melalui perpustakaan dibawah binaan Dispusip Berau.

"Sebagian besar kampung yang ada di Berau sudah memiliki perpustakaan. Kami akan terus kembangkan sampai seluruh kampung punya per-

pustakaan," katanya.

Agar seluruh kampung memiliki perpustakaan, kata Yudha, Dispusip Berau berupaya menggelar lomba perpustakaan antar kampung.

"Itu kami gelar secara rutin tiap tahun. Lomba perpustakaan ini juga kami lakukan agar perpustakaan terus menyebar ke seluruh kampung dan mereka semua berada di bawah binaan kami," imbuhnya.

Diungkapkan pula, salah satu metode lainnya seperti saat memperingati Bulan Kunjung Perpustakaan pihaknya isi dengan melaksanakan Festival Literasi.

"Luar biasa antusias warga mengikuti berbagai rangkaian lomba dan aneka kegiatan di Festival Literasi. Kami juga merasa bangga mendapat dukungan luar biasa dari ibu Bupati Berau," pungkasnya. (adv/and)



MONITORING: Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si meninjau kegiatan normalisasi Sungai Buaya, Tanjung Selor, Selasa (12/9).

Wagub Yansen TP: Normalisasi Sungai Buaya jadi Kebutuhan Mendesak

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si, melakukan peninjauan kegiatan normalisasi Sungai Buaya Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada Selasa (12/9). Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan normalisasi sungai berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam peninjauannya, Wagub didampingi oleh beberapa pejabat, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Bulungan, Errin Wiranda, SE, Kepala Biro Pembangunan Kaltara, Sapi'i, Kepala Satpol PP Kaltara, Selamat R, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Wagub Kaltara mengatakan bah-

wa normalisasi Sungai Buaya adalah langkah penting dalam upaya mengatasi banjir di wilayah Kaltara. Sungai Buaya, sebagai salah satu sungai di Kaltara, memiliki potensi banjir yang signifikan.

"Normalisasi sungai ini sangat penting dan merupakan kebutuhan mendesak," ujar Wagub Kaltara, Yansen TP.

Sesuai kondisi di lapangan, progress normalisasi Sungai Buaya pada segmen I, hasil kerjasama antara Pemprov Kaltara dengan Komando Resort (Korem) 092/Maharajalila, telah mencapai 59,94 persen. Sementara pada pengerjaan segmen II, yang menjadi tanggung jawab

Pemprov Kaltara melalui DPUPR-Perkim, progresnya telah mencapai 30,27 persen.

Kegiatan normalisasi ini mencakup pengerukan endapan lumpur hingga kedalaman 2 meter, pembersihan sampah dan eceng gondok di sungai. Selain itu, juga ada pengerukan sedimen di sekitar sungai untuk memperlebarnya hingga lebar mencapai 30 meter.

Wagub Yansen TP berharap agar kegiatan normalisasi Sungai Buaya dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, diharapkan risiko banjir di wilayah Kaltara dapat diminimalkan. (dkisp)



SP4N-LAPOR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang SP4N-LAPOR, Selasa (12/9/2023).

Gandeng Mahasiswa, Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Kaltara Sosialisasi SP4N-LAPOR!

TARAKAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), Selasa (12/9/2023).

Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara berkolaborasi dalam inisiasi sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pelayanan publik.

Tidakhanya itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) juga turut hadir sebagai salah satu leading sector dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kaltara.

Sosialisasi yang bertajuk "SP4N-LAPOR! Goes to Campus" dibuka oleh Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H.

Syahrullah Mursalin, M.P., dengan kehadiran Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.

Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, menyambut baik kegiatan ini karena diyakini bahwa mahasiswa pasti memiliki keluhan terhadap pelayanan yang ada di kampus.

"Rekan-rekan mahasiswa yang malu atau takut mengadukan pelayanan kampus, bisa melaporkan melalui aplikasi LAPOR! ini," kata Adri Patton kepada mahasiswa.

Syahrullah Mursalin mengapresiasi terobosan kegiatan yang menasar kaum intelektual sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, diungkapkan bahwa hingga September 2023, telah tercatat 14 aduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!.

"Hanya ada 14 aduan yang masuk

ke Kaltara melalui aplikasi ini. Jumlah ini kurang bisa menggambarkan kondisi pelayanan publik di Kaltara," ucap Syahrullah Mursalin.

Lanjutnya, Syahrullah berharap agar mahasiswa dapat aktif mengawasi proses pelayanan publik di Kaltara, dengan harapan bahwa partisipasi mereka akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan menuju arah yang lebih baik.

"Kita berharap kawan-kawan mahasiswa tetap mengawasi pelayanan publik yang ada, kalau ada pelayanan yang kurang bagus bisa diadukan melalui aplikasi LAPOR!," tutup Syahrullah sebelum membuka kegiatan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini Ombudsman RI Kaltara juga membuka gerai pelaporan dan konsultasi untuk mahasiswa UBT sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mengawasi pelayanan publik di Kaltara. (dkisp)



dr. Anis Prihatna, Kepala Puskesmas Mamburungan Tarakan.

ADE/MKR

Kepala Puskesmas Mamburungan Ungkap Setumpuk Kendala Atasi Stunting di Kawasan Pesisir

TARAKAN - Kepala Puskesmas Mamburungan, dr. Anis Prihatna mengaku mengalami sejumlah kendala dalam mengatasi stunting di kawasan pesisir.

Ia memaparkan, kendala yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh yang baik. Padahal sangat erat kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota keluarga baik ayah ataupun ibu.

Sebagai contoh pada saat kehamilan, ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, memperhatikan kebersihan pribadi (personal hygiene), dan melakukan hal-hal yang menyenangkan yang dapat menjadi stimulasi positif bagi bayi selama dalam kandungan.

"Intinya masyarakat pesisir kurang paham pentingnya pola asuh. Padahal ini sangat penting untuk mencegah stunting," katanya, Selasa (12/9/2023).

Menurutnya, masyarakat pesisir belum menyadari bahwa stunting berbahaya. Mereka menilai hal tersebut bukanlah penyakit, sehingga

gamerasakan masalah yang besar.

"Padahal untuk menentukan masa depan yang baik sangat ditentukan dari awal perkembangan. Itulah kami selalu mengedukasi terkait hal tersebut," tuturnya.

Yang kedua, lanjut Anis, dari kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh. Di kawasan pesisir seperti Tanjung Pasir, kebersihan air dan sanitasi masih kurang.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya. Yakni rutin melakukan pemeriksaan Antenatal Care (ANC).

"Pemeriksaan ANC merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar," paparnya.

Selain itu, melakukan sosialisasi pentingnya memenuhi gizi yang baik. Serta memberi tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah se-

kolah. Tak hanya itu, pihaknya juga rutin melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak, sebagai upaya preventif mencegah anak stunting.

"Seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala. Kemudian, juga melakukan imunisasi rutin dan kejar," terang dr. Anis.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Tarakan 2023, ada 93 kasus stunting di Puskesmas Mamburungan. Sementara secara keseluruhan, angka stunting di Tarakan sebesar 6,16 persen atau 684 kasus.

Puskesmas Mamburungan, melayani kesehatan dari beberapa wilayah yang salah satunya adalah Tanjung Pasir. Di lokasi ini pula, dibangun Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang diresmikan serentak oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kawasan itu akan berfokus pada lima klaster, salah satunya klaster kesehatan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika

Jelang Pemilu 2024, Kesbangpol Tarakan Ingatkan Masyarakat Bijak Gunakan Media Sosial

TARAKAN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Terlebih, pemilihan umum 2024 sebentar lagi akan berlangsung sehingga rawan memicu konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, media sosial dapat menjadi sumber konflik jika tak digunakan dengan bijak.

“Media sosial bisa menjadi sumber konflik. Itulah perlunya melakukan edukasi ke masyarakat supaya cerdas dan jangan terprovokasi jangan terbawa emosi untuk kepentingan politik sesaat,” ucap Sujay Staf Khusus Analisis Ormas Kesbangpol Tarakan, Selasa (12/9/2023).

Sujay mengatakan pihaknya mengalami kesulitan melakukan monitoring perkembangan masalah di masyarakat melalui media sosial. “Paling tidak kita minta bantuan Diskominfo untuk meredak hoax di masyarakat supaya tidak berkembang,” katanya.

Menurutnya, masyarakat saat ini harus lebih cerdas dalam memilah berbagai informasi di media sosial. Kata Sujay, jangan mudah terprovokasi dan terbawa emosi terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Di media sosial black campaign sudah gencar terus. Jadi masyarakat sudah dicecoki hal negatif sehingga negatif tingking. Kadang-kadang dulunya teman akrab sekarang musuh karena beda pilihan politik,” lanjutnya.

Dilanjutkannya, Kesbangpol Tarakan memiliki Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Tujuannya, meredam berbagai konflik di masyarakat termasuk konflik di media sosial. Menurutnya, patroli siber juga sangat diperlukan untuk meredam konflik di media sosial.

Terpisah, Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona mengatakan akan meningkatkan patroli siber menjelang Pemilu 2024 untuk mengantisipasi berita dan informasi bohong (hoaks) di media sosial.

Ronaldo menyebut sejauh ini kon-

testasi politik 2024 masih terpantau aman di Tarakan. Dari hasil patroli siber yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang positif.

Dia mengatakan menciptakan keamanan dan ketertiban di tahun politik ini merupakan tanggungjawab semua pihak. Sejauh ini, Polres Tarakan belum mendapati berita hoaks dan berita yang memprovoka-

si menjelang pemilu 2024. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan di media sosial terhadap kerawanan yang terjadi menjelang pemilu, selain pemantauan berita hoaks. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Staf Khusus Analisis Ormas Kesbangpol Tarakan, Sujay.



Rumah korban di RT 01 Kelurahan Karang Rejo Kota Tarakan.

ADE/MKR

Penemuan Mayat Pria Gegerkan Warga Tarakan, Korban Diduga Bunuh Diri

TARAKAN - Seorang pria berinisial A(27) ditemukan tewas diduga bunuh diri di rumahnya di RT 01 Kelurahan Karang Rejo Kota Tarakan, Senin (12/9/2023).

Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakhika Putra mengatakan, mayat itu pertama kali diketahui oleh kakak korban sekira pukul 08.30 Wita, usai pulang bekerja sebagai satpam. Setelah mengetahui hal tersebut, kakak korban langsung melapor ke Polres Tarakan.

"Adapun setelah ditemukan saksi, yang bersangkutan langsung mel-

apor ke Polres Tarakan. Dan Polres langsung melakukan penyelidikan dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum," ucapnya.

Dari hasil visum, kata AKP Randhya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. "Posisi lidah dalam posisi tergigit, alat kelamin mengeluarkan cairan dan terdapat lilitan menggunakan tali rafia dan simpul hidup," lanjutnya.

Usai divisum, korban kini telah dimakamkan. Pada laporan ini polisi telah memeriksa seorang saksi, yakni pelapor yang juga merupakan kakak

korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui sebelumnya korban pernah tertangkap tangan melakukan hal serupa yakni bunuh diri namun berhasil digagalkan.

"Tempat gantung dirinya itu berada di antara ruang tengah dan dapur. Sampai saat ini, yang baru diperiksa satu orang yakni kakak korban yang juga membuat laporan awal," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Prabowo Mania (PM) 08 Kaltara, Antonius Rozario (kanan) didampingi unsur pengurus PM 08 Kaltara.

Pengurus Prabowo Mania 08 Kaltara Bakal Dilantik Hari Ini

TARAKAN - Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebanazer atau yang akrab disapa Noel dijadwalkan hadir ke Kalimantan Utara pada Selasa, 12 September 2023. Agenda kedatangan Noel ke Benuanta dalam rangka silaturahmi sekaligus melantik pengurus Prabowo Mania 08 Kaltara yang akan berlangsung di Tarakan Plaza.

Ketua terpilih Prabowo Mania (PM) 08 Kaltara, Antonius Rozario mengatakan, persiapan saat ini sudah seratus persen, proses perizinan dan tempat sudah selesai serta tidak mengalami kendala.

Sesuai dengan jadwal yang disampaikan panitia, dari Jakarta rombongan Ketum PM 08 tiba di Bandara Juwata Tarakan sekitar pukul 10.00 Wita, setibanya di Bandara akan

dilakukan prosesi penyambutan dengan tarian adat dan tepung tawar.

“Prosesi penyambutan kita lakukan sesuai dengan adat dan budaya di Kaltara, setelah itu rombongan akan kita kawal menuju Hotel Tarakan Plaza dengan melibatkan ribuan motor dan puluhan roda 4,” beber Antonius.

Sementara kegiatan inti, yakni pelantikan relawan PM 08 se-Kaltara akan berlangsung pada pukul 19.00 Wita di Ballroom Tarakan Plaza.

“Seluruh pengurus relawan besok langsung dilantik oleh Ketum, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Dengan jumlah relawan Prabowo Mania 08 di Kaltara yang mencapai 80 ribu relawan, kami bertekad pada pesta demokrasi Pilpres 2024 berjuang sekuat tenaga untuk me-

menangkan Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden”, katanya.

Setelah kegiatan di Kota Tarakan, rencana kegiatan Ketum dan rombongan akan dilanjutkan ke sejumlah daerah di Kaltara, termasuk ke perbatasan Kabupaten Nunukan.

“Agenda selanjutnya Ketum Noel akan melakukan silaturahmi dengan beberapa tokoh yang ada di Kabupaten Nunukan dan tim relawan Prabowo Mania yang ada di perbatasan, kita berharap agenda tetap berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan apapun”, tutup Antonius. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia

Editor: Andhika



Kepala Kesbangpol Berau, Salim.

Kesbangpol Berau Lakukan Pembinaan Terhadap Ormas Jelang Pemilu 2024

TANJUNG REDEB - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau akan melakukan pembinaan terhadap Ormas yang ada di Bumi Batiwakkal.

Kepala Kesbangpol Berau, Salim memaparkan, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada yayasan, paguyuban, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga ket-erwakilan suku dan ras.

“Untuk tahap awal pembinaan sudah kamilakukan tinggal tahap kedua. Karena menjelang Pemilu ini, konflik

sosial rawan terjadi karena banyak yang mendukung salah satu partai,” terangnya, Selasa (12/9/2023).

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya konflik sosial, diperlukan kesamaan persepsi, pemikiran dan kebersamaan yang harus ditanamkan ke seluruh Ormas.

“Jadi para Ketua Ormas harus mengkondisikan anggotanya, agar konflik sosial dapat dicegah menjelang pesta demokrasi ini,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemilihan serentak nanti bertujuan mencari orang terbaik yang memimpin daerah maupun negara. Sehingga, kata

Salim, tak perlu saling menjatuhkan.

“Yang paling penting adalah tidak ikut berpartisipasi dalam politik uang, bila perlu seluruh Ormas yang ada di Berau bersinergi memberantas hal tersebut,” tegasnya.

Kendati demikian, dirinya berpesan bahwa pesta demokrasi bukan ajang saling menjatuhkan atau saling mengalahkan. Tetapi melahirkan pemimpin yang mampu meningkatkan daerah.

“Kita harus dukung yang bersifat positif, jangan sampai ada kekacauan yang timbul dalam Pemilu 2024 nanti,” tandasnya. (and)